**BAB IV**

**ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi dan menggali permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada dengan menggunakan metode curah pendapat (*brain storming*) dan sekaligus menganalisis keterkaitan masing-masing isu strategis dengan isu strategis yang lainnya.

Penentuan identifikasi masalah dan isu-isu strategis dilakukan dengan melihat data dan capaian kerja yang tersaji pada Bab II serta dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Temanggung.

Analisa isu-isu strategis Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 didapatkan dari hasil analisis terhadap kondisi internal dan eksternal pada tahun 2013 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi daerah, dan kesinambungan pembangunan.

* 1. **Identifikasi Permasalahan**

Berdasarkan hasil identifikasi dan penggalian permasalahan yang dihadapi daerah, maka permasalahan pokok pada masing-masing urusan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. **Urusan Wajib**
2. **Pendidikan**
3. Menurunnya budi pekerti masyarakat;
4. Belum tercukupinya kebutuhan guru terutama untuk memenuhi kebutuhan di tingkat pendidikan dasar berdasarkan kondisi geografis dan distribusi murid;
5. Rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru, khususnya pada jenjang TK/RA dan SD/MI;
6. Belum semua guru memenuhi kualifikasi pendidilan S-1/D-4;
7. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar;
8. Masih rendahnya angka melanjutkan sekolah yang disebabkan kurangnya aksesibilitas masyarakat atas pendidikan, terutama pendidikan menengah;
9. **Kesehatan**
10. Masih banyaknya Kematian Bayi;
11. Masih banyaknya Kematian Ibu;
12. Masih banyaknya Kematian Balita;
13. Cakupan Keluarga yang memiliki akses atas rumah sehat, makanan sehat, dan lingkungan sehat masih rendah;
14. Rasio dokter terhadap jumlah penduduk masih rendah dan distribusi tenaga medis yang belum merata;
15. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti: penduduk miskin, wilayah terpencil, dan perbatasan, serta Lansia;
16. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan terhadap pelayanan kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan ;
17. Masih adanya persepsi negative atas pelayanan kesehatan di BLUD RSUD dan Puskesmas beserta jaringannya;
18. Tingginya angka prevalensi HIV/AIDS yang didukung dengan kurangnya pemahaman akan HIV/AIDS;
19. Sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi standar, khususnya di BLUD RSUD dan Puskesmas beserta jaringannya.
20. **Pekerjaan Umum**
21. Masih adanya jalan, jembatan, drainase, dan trotoar dengan kondisi yang rusak dan rusak berat;
22. Belum optimalnya sistem informasi infrastruktur daerah;
23. Rendahnya ketersediaan jalan alternatif sebagai pengurai kepadatan lalu lintas;
24. Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pelayanan air bersih;
25. Rendahnya pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan air tanah;
26. Banyaknya jaringan irigasi yang tidak terpelihara dengan baik dan masih rendahnya upaya pembangunan jaringan irigasi baru.
27. **Perumahan**
28. Banyaknya rumah tidak layak huni;
29. Adanya kawasan permukiman yang berada di daerah rawan bencana;
30. Adanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan;
31. Sarana dan prasarana lingkungan sehat di kawasan permukiman masih belum memenuhi standart.
32. Masih kurangnya penyediaan infrastruktur dasar air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)
33. **Penataan Ruang**
34. Belum ditetapkannya rencana detail tata ruang dan belum tersusunnya dokumen lain yang diamanatkan dalam RTRW;
35. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah;
36. Belum optimalnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
37. **Perencanaan Pembangunan**
38. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan data pendukung perencanaan pembangunan;
39. Belum optimalnya keterlibatan kelompok yang termarginalkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya kelompok perempuan, penduduk miskin, dan anak;
40. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai umpan balik penyusunan rencana pembangunan daerah tahun berikutnya;
41. Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam bidang perencanaan;
42. **Perhubungan**
43. Sarana dan prasarana jalan, berupa rambu-rambu, penunjuk jalan, marka jalan, pengaman jalan, dan Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) masih kurang dan belum memenuhi standar kebutuhan;
44. Belum optimalnya peningkatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan terminal, sub terminal, dan halte;
45. Rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum perhubungan darat;
46. Tingginya laju pertumbuhan jumlah kendaraan lebih besar dari laju pertumbuhan sarana prasarana jalan.
47. **Lingkungan Hidup**
48. Belum optimalnya penanganan pencemaran lingkungan hidup;
49. Belum optimalnya penanganan sampah, khususnya sampah dipermukiman dan industri;
50. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
51. Belum optimalnya perlindungan dan konservasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup;
52. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
53. **Pertanahan**
54. Masih sedikit bidang tanah yang terdaftar atau yang sudah diberikan legalitas berupa sertifikat;
55. Adanya konflik pertanahan di masyarakat;
56. Belum optimalnya Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam mendapatkan hak atas tanah.
57. **Kependudukan dan Catatan Sipil**
58. Kurangnya keakuratan dan validitas data base Kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan Pemerintahan;
59. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
60. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan dan catatan sipil.
61. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
62. Rendahnya dukungan sumber daya dan kelembagaan terhadap strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)/Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dan program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP);
63. Belum optimalnya implementasi Kabupaten Layak Anak;
64. Belum optimalnya peran serta perempuan dan anak serta kesetaraan gender dalam pembangunan.
65. **Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**
66. Melemahnya daya dukung dan kemampuan penggerak program KB di masyarakat karena jumlah tenaga PLKB yang masih belum memenuhi standar kebutuhan;
67. Belum optimalnya peran Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam mendukung program KB;
68. Terbatasnya penguatan modal bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), sehingga menjadi kelompok yang kurang berkembang;
69. Masih rendahnya partisipasi KB laki-laki;
70. Masih adanya perempuan menikah dibawah usia 20 tahun.
71. **Sosial**
72. Kurangnya sarana dan prasarana panti sosial, rumah singgah, dan sarana prasarana sosial lainnya yang memenuhi standar kelayakan;
73. Belum tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan nama dan alamat yang jelas dan akurat;
74. Terbatasnya jumlah lembaga-lembaga sosial/organisasi sosial dan jumlah tenaga kesejahteraan sosial yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penanganan permasalahan kesejahteraan;
75. Kurangnya kesadaran masyarakat dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi;
76. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
77. Belum optimalnya peran serta dunia usaha dan swasta dalam rangka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
78. **Tenaga Kerja**
79. Belum optimalnya pelaksanaan peraturan mengenai Norma kerja, Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) dan perlindungan karyawan oleh perusahaan.
80. Adanya perusahaan yang belum membayar upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tetapi tidak mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku, khususnya pada perusahaan skala kecil;
81. Belum optimalnya penanganan PHI/PHK (Perselisihan Hubungan Industrial/Pemutusan Hubungan Kerja);
82. Rendahnya pemahaman para pengusaha dan pekerja terhadap peraturan perundang-undangan ketenaga-kerjaan.
83. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia ketenaga-kerjaan, meliputi: tenaga teknis pengawas ketenaga-kerjaan, mediator hubungan industrial, pengantar kerja, dan instruktur pelatihan.
84. Belum semua pendaftar pencari kerja bisa ditempatkan baik melalui Angkatan Kerja Lokal (AKL), Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN), dimana dipengaruhi oleh terbatasnya lowongan kerja;
85. Belum semua lowongan kerja bisa terisi karena tidak sesuainya antara tingkat pendidikan/ ketrampilan pencari kerja dengan lowongan kerja yang ditawarkan;
86. Sarana dan prasarana pelatihan kerja yang belum memadai dan sesuai kebutuhan pencari kerja.
87. **Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
88. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang diikuti dengan validasi data koperasi aktif;
89. Belum optimalnya penciptaan iklim usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang kondusif;
90. Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil menengah;
91. Rendahnya kualitas pengembangan SDM, permodalan dan peralatan penunjang kelembagaan koperasi dan UMKM .
92. **Penanaman Modal**
93. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang menangani penanaman modal;
94. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan perijinan penanaman modal;
95. Belum optimalnya pengkajian dan pengembangan penanaman modal;
96. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan perijinan penanaman modal.
97. **Kebudayaan**
98. Kurangnya apresiasi Pemerintah Daerah terhadap seni dan budaya daerah;
99. Menurunnya nilai-nilai etika, moral, budaya dan keagamaan pada masyarakat;
100. Belum optimalnya pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan benda-benda budaya dan cagar budaya;
101. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional.
102. **Pemuda dan Olahraga**
103. Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam upaya peningkatan kapasitas anggotanya, khususnya dalam memberikan kemandirian dan kecakapan untuk hidup;
104. Masih terbatasnya sumber daya manusia dalam pemasyarakatan olah raga, pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi;
105. Menurunnya nilai-nilai nasionalisme di kalangan pemuda;
106. Kurangnya fasilitasi, penghargaan, sarana dan prasarana kepemudaan serta peran swasta dalam pengembangan pemuda dan olahraga.
107. **Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**
108. Masih kurangnya fasilitasi kemitraan dengan Ormas, LSM, dan Partai Politik;
109. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemahaman budaya politik dan menurunnya nilai-nilai etika moral dalam kehidupan politik;
110. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan;
111. Perlunya peningkatan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
112. Meningkatnya kenakalan remaja dan kecenderungan penyalahgunaan narkoba;
113. Sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kinerja Satpol PP masih belum memenuhi standar kebutuhan;
114. Belum berfungsinya tenaga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang menangani penyelidikan pelanggaran Perda dan pelanggaran disiplin PNS.
115. **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**
116. Belum optimalnya pelayanan publik karena belum seluruh SKPD menerapkan aturan-aturan dan standar yang sudah ditetapkan, seperti SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik);
117. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa dalam rangka peningkatan pembangunan desa;
118. Kurangnya pemahaman tugas dan fungsi masing-masing lembaga yang ada di Desa;
119. Kurangnya kualitas dan kuantitas kecukupan tenaga PNS dalam mengisi jabatan Sekretaris Desa yang kosong;
120. Belum optimalnya kerja sama antar pemerintah daerah dalam rangka menciptakan hubungan antar daerah yang kondusif dan meminimalkan konflik antar daerah;
121. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*) yang didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan;
122. Belum optimalnya kinerja beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga masih perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin dan periodik untuk meningkatkan kinerjanya;
123. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
124. Belum optimalnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
125. Belum optimalnya tertib pengelolaan keuangan daerah;
126. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah;
127. Banyaknya pejabat struktural yang belum mengikuti Diklatpim dan adanya keterbatasan anggaran mengakibatkan belum semua pejabat struktural bisa mengikuti Diklatpim;
128. Kurangnya jumlah PNS, khususnya untuk memenuhi pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.
129. **Ketahanan Pangan**
130. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah, khususnya sarana dan prasarana penyimpanan di tingkat desa;
131. Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi pangan;
132. Belum optimalnya perkembangan diversifikasi produk pertanian;
133. Adanya wilayah yang mengalami kerentanan rawan pangan;
134. Adanya bahan pangan yang kurang memenuhi aspek keamanan pangan;
135. **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
136. Belum optimalnya peran kelembagaan desa;
137. Masih minimnya BUMDes;
138. Masyarakat masih kurang mampu mengidentifikasi atau menemukan dan memahami kebutuhan dirinya dan belum mampu mengaktualisasikan berbagai potensi yang ada pada dirinya;
139. Rendahnya peran kelompok termarginalkan dalam pembangunan desa.
140. **Statistik**
141. Belum optimalnya dukungan data/informasi statistik dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
142. Belum optimalnya sinkronisasi data antara BPS dan Pemerintah Daerah.
143. **Kearsipan**
144. Belum optimalnya pengelolaan arsip;
145. Sarana dan Prasarana kearsipan yang belum memenuhi standar.
146. **Komunikasi dan Informatika**
147. Belum optimalnya pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
148. Sarana dan prasarana TIK yang belum merata di semua wilayah, terutama di ruang publik dan lembaga pemerintahan;
149. **Perpustakaan**
150. Rendahnya minat baca masyarakat;
151. Sarana, prasarana, dan sumber daya manusia pengelola layanan perpustakaan belum memenuhi standar kebutuhan;
152. Terbatasnya jumlah koleksi dan kualitas bahan pustaka dalam memenuhi kebutuhan pembaca.
153. **Urusan Pilihan**
154. **Pertanian**
155. Terbatasnya infrastruktur, Sarana Prasarana, Lahan, dan Air Pertanian;
156. Lemahnya status dan kecilnya luas penguasaan lahan oleh Petani;
157. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Perbenihan dan Perbibitan;
158. Terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan, informasi, dan pasar.
159. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani, peternak, dan penyuluhan pertanian;
160. Rendahnya pemanfaatan teknologi pertanian sehingga pertanian masih bersifat tradisional dan kurang memperhatikan kaidah pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan;
161. Belum optimalnya peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pertanian dalam mendukung perkembangan Agribisnis, Agrowisata, dan Agroindustri;
162. Makin berkurangnya sumber daya manusia di sektor pertanian;
163. Belum adanya keterpaduan antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian;
164. Tingginya serangan hama dan penyakit tanaman pertanian, serangan penyakit pada ternak, serta ancaman berkembangnya penyakit;
165. Belum optimalnya pemanfaatan potensi produksi komoditas perkebunan;
166. Belum stabilnya kualitas hasil produksi perkebunan;
167. Belum optimalnya pengembangan kawasan pertanian sesuai dengan potensi wilayah.
168. **Kehutanan**
169. Tingginya laju erosi di wilayah Gunung Sumbing, Sindoro, dan Gunung Prau serta di Daerah Aliran Sungai (DAS);
170. Tingginya kebutuhan kayu untuk bahan baku industri;
171. Masih banyak petani melaksanakan tebang butuh sehingga pengelolaan hutan lestari belum terwujud;
172. Luasnya serangan hama penyakit pada tanaman kayu yang berakibat menurunnya kualitas kayu;
173. Belum tertibnya penatausahaan hasil hutan meliputi perijinan Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), peredaran hasil hutan, dan administrasi pelaporan kepada dinas/instansi terkait;
174. Belum optimalnya kelembagaan masyarakat di sekitar hutan.
175. **Kelautan dan Perikanan**
176. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Perbenihan;
177. Terbatasnya akses pembudidaya ikan terhadap sumber permodalan, informasi dan pasar;
178. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan dan penyuluhan perikanan;
179. Belum optimalnya pengembangan Minapolitan;
180. Terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana pembudidaya ikan;
181. Rendahnya ketrampilan sumber daya manusia dalam penerapan teknologi budidaya perikanan;
182. Belum optimalnya pembudidayaan ikan non konsumsi (ikan hias);
183. Rendahnya konsumsi ikan masyarakat Kab. Temanggung.
184. **Energi dan Sumber Daya Mineral**
185. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang energi baru terbarukan sebagai bahan pengganti bahan bakar fosil;
186. Masih adanya kegiatan penambangan yang menyebabkan kerugian materiil maupun kerusakan lingkungan;
187. Kurangnya cakupan pelayanan Lampu Penerangan Jalan Umum.
188. **Pariwisata**
189. Lemahnya daya saing dan daya jual destinasi pariwisata;
190. Belum optimalnya pengembangan potensi wisata yang ada;
191. Belum optimalnya kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha pariwisata dan pemberdayaan masyarakat.
192. **Perdagangan**
193. Belum optimalnya pemberdayaan usaha perdagangan mikro, kecil dan menengah;
194. Rendahnya capaian ekspor produk kabupaten Temanggung;
195. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
196. Sarana dan prasarana perdagangan masih belum merata di semua wilayah.
197. **Industri**
198. Rendahnya nilai tambah produksi dan daya saing produk industri;
199. Belum optimalnya perkembangan sentra atau klaster industri potensial;
200. Rendahnya penguasaan dan penggunaan teknologi dalam proses produksi;
201. Pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja yang belum memadai;
202. Rendahnya produktivitas industri;
203. Adanya industri mikro, kecil dan menengah yang belum memiliki ijin usaha, dan terbatasnya akses permodalan dan pemasaran.
204. **Transmigrasi**
205. Terbatasnya jumlah penempatan transmigrasi, serta masih lemahnya kerja sama antar pemerintah dan pemerintah daerah di bidang ketransmigrasian;
206. Belum optimalnya fasilitasi penyiapan, penempatan dan pemantapan bagi calon transmigran.
	1. **Isu Strategis**

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pokok per urusan pemerintahan daerah dan dikaitkan dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki serta keberlanjutan pembangunan daerah, maka permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2013-2018 adalah:

1. Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
3. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
4. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan insfrastrukur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
5. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan;
6. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
7. Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat;
8. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga;
9. Belum optimalnya pemerataan pembangunan insfrastruktur daerah;
10. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap layanan transportasi;
11. Belum optimalnya pengelolaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengelolaan lingkungan hidup;
12. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan yang didukung dengan pelaksanaan *e-Goverment*;
13. Belum optimalnya pelayanan publik.

Isu-isu strategis yang merupakan hasil pengelompokan atas identifikasi permasalahan pokok pada masing-masing urusan pemerintahan daerah akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan umum pembangunan daerah, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Visi dan Misi Daerah pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.